

**PEMERINTAHAN LOKAL DAN PERKEMBANGAN
POLITIK DEMOKRATIK**

Oleh :
Abdul Syakur*)

Abstraksi

Penyebaran ide demokrasi dan munculnya sistem global telah memberi kontribusi bagi suatu kebangkitan daerah. Sebagian besar bentuk desentralisasi di abad 20 adalah pemisahan dari kerajaan menjadi negara-negara kesatuan, sebagai contoh terbarunya Unisoviet. Tekanan demokrasi telah mendorong pada sebuah penekanan baru pada tingkatan bawah pemerintahan lokal dari suatu bangsa. Berkembangnya suatu ekonomi politik global menyediakan tempat-tempat alternatif untuk modal nasional. Meskipun pola-pola pemerintahan daerah yang baik memiliki keistimewaan yang mirip dengan propinsi dan pemerintah daerah, mendorong demokrasi untuk memberi politisi-politisi lokal sebuah peran besar dalam isi-isu perdamaian dan kemakmuran yang kemudian menjadi kebenaran sepanjang dari berkembangnya otoritas bangsa.

Kata Kunci : Pemerintahan Lokal, Poltiik Demokratik

A. Pendahuluan

Pada akhir abad 19, hampir semua pemerintah lokal di dunia pengaturannya diawasi oleh pusat dari sedikit kerajaan melalui administrasi kolonial atau penggabungan untuk memperluas teritorial negara.

Pengecualian utama adalah dimulai pecahnya koloni di utara dan selatan Amerika, Australia, dan Selandia

baru; tidak pernah ada daerah koloni di Thailand dan Ethiopia, sekalipun menjadi bagian jajahan atas Asia dan Antartika; dan diakomodasi oleh Jepang, yang mulai mengajak berhubungan dengan kependudukan Belanda dan kemudian Amerika Serikat. Jepang menjadi satu yang utama, tapi hidupnya pendek sebagai penjajah pada abad 20.

Dekolonialisasi dan cepat berlipatnya negara-negara yang mandiri setelah berakhirnya perang dunia II, sebuah proses masih berlanjut. PBB sekarang mengakui kurang lebih 190 negara mandiri. Dari beberapa ribu prinsip-prinsip pada abad 16 menjadi sedikitnya 30 negara-negara ditahun 1980an. Negara Eropa sekarang pecah menjadi negara-negara kecil. Unisoviet terurai menjadi beberapa negara di Asia tengah dan Eropa dan proses ini belum selesai. Tetapi sebagai proses pembentukan negara-negara yang baru keluar dari negara yang tua berlangsung secara cepat, negara menyerahkan kekuasaan dan wewenang pada badan-badan internasional dan memunculkan pemerintahan lokal dan regional.

Struktur dan budaya lokal kurang setuju untuk mengubah dari tingkatan tertinggi dari organisasi politik. Hal ini lebih mudah untuk menempatkan konstitusi nasional yang baru dari pada untuk menetapkan organisasi-organisasi partai politik akar rumput dan memecahkan dominasi keluarga pada pengaruh politik. Yang telah diakui lebih dari 2000 tahun dalam sejarah kerajaan. Modal nasional akan bentrok dengan daerah. Pemerintah nasional mendorong untuk merubah dan biasanya ditentang-tentu saja-ditumbangkan oleh daerah. Internasional mendorong pada perdagangan bebas dan

kesepakatan internasional, seringkali kekuatan ini dilawan oleh daerah, khususnya oleh kepentingan-kepentingan yang kemudian dilayani oleh modal-Modal nasional.

Jika pemerintahan lokal menjadi demokratis, kemudian seharusnya mereka mempunyai otonomi,. Jika mereka mempunyai otonomi, mereka akan mencobanya dan menjadikan hubungan yang lebih penting dalam urusan sehari-hari. Tetapi otonomi juga akan meminta kemandirian untuk menetapkan hubungan-hubungan tidak hanya dengan pemerintah lokal lainnya dalam negara kira, tetapi juga dengan negara-negara lainnya sebagaimana institusi global.

B. Pembahasan

1. SISTEM POLITIK TERITORIAL

Prinsip-prinsip yang mendasari politik jaman sekarang dikendalikan dari kontrol hirarki setiap daerah kekuasaan.

Hubungan dalam hierarki diubah oleh teknologi. Di masa lampau, teknologi didirikan dari kekuatan tentara dan angkatan laut yang nyata, hari ini terdiri dari komunikasi elektronik yang menjanjikan keamanan dan kemakmuran. Komunikasi dan informasi, permintaan pengawasan, dan sarana dan ditajamkan oleh tipisnya ruang fisik. Semua teritorial pemerintahan publik sebelumnya dibatasi. Batas-batas dari negara dan kota didefinisikan oleh pernyataan undang-undang tegas, umumnya penetapan peraturan dibandingkan (diadu) terlebih dahulu. Sebagian besar sumber terjadinya konflik politik adalah ketidakcocokan antara tuntutan, tindakan dan penetapan pengawasan politik atas

teritorial. Pada masa lalu, hal ini dapat diatasi oleh tentara.

Intepretasi kedepan dari arti syarat-syarat teritorial pada abad 20 dialamatkan pada dekolonisasi, yang memunculkan negara baru disetiap tempat, terjadi di seluruh dunia dalam suatu sistem produksi dan penukaran-suatu politik ekonomi global- dan membangkitkan bermacam lokalisme baru, menyerap dan menerapkan bentuk kesatuan yang besar dan membagi kekuatan nasionalisme dan kebangsaan. Negara yang berkuasa pada abad 20 tidak akan menahan politik, yang sungguh-sungguh ada pada hari ini, dan akan lebih banyak sistem baru dari penahanan politik kerajaan. Pada akhirnya persatuan Unisoviet tidak terlepas dari konflik antara kekuatan global perubahan dan desakan internal dari pengawasan teritorial atas pendapat-pendapat lokal.

2. POLA-POLA PEMERINTAHAN LOKAL

Apapun tipe sistim politik nasional, otoriter atau demokratis, presidensiil atau parlementer, pada umumnya mereka mengatur pembagiannya menjadi tiga tingkat atau level dan dua sektor pemerintahan. Ketiganya adalah pemerintah pusat, propinsi atau modal pertengahan, dan lokal. Lokal dibagi menjadi daerah desa dan kota, meskipun beberapa perbedaan yang ada dibeberapa negara adalah peninggalan dari suatu pola pertanian yang lampau. Di beberapa negara, ketentuan-ketentuan khusus dibuat bagi pemerintahan lokal dan sebagian besar pusat-pusat perkotaan. Pengecualian dari tiga pola tingkatan ini adalah rejim militer secara langsung mengawasi pemerintah lokal, tapi hari ini regime

militer menjadi lebih sedikit dan pengakuannya adalah sementara.

Lebih dari dua perkembangan politik lokal yang terbaru, yang pada akhirnya bentuknya tidak jelas, lingkungan yang sungguh-sungguh baru dan organisasi-organisasi politik dari khususnya distrik teritorial dipertemukan dengan fungsi-fungsi yang tidak sejajar dengan penetapan batas-batas pemerintahan lokal. Para pembentuk ini mempunyai peran penting dalam proses pembusukan dari kota-kota besar atau organisasi lokal dari kota negara.

Dengan semakin luasnya struktur dari bagaimana negara-negara mendasarkan cara memerintah bermacam-macam daerah, tetapi perbedaan ini tidak begitu penting, karena sebagian besar mempunyai kesamaan. Pertama, hampir semua pemerintahan lokal adalah bagian dari pengaturan lokal, jadi segala sesuatu yang dilakukan pemerintah lokal adalah untuk menyeleksi suatu pemerintahan.

Kedua, semua pemerintah lokal memiliki sumber daya lokal, meski bermacam-macam, pengaturannya mulai dari sedikitnya 10% dari semua pengeluaran pemerintah lokal sampai hampir 100%.

Ketiga, semua pemerintahan lokal mempunyai tanggungjawab administratif, mulai dari polisi, kemakmuran sampai perkembangan ekonomi.

Keempat, semua pemerintahan lokal mempunyai beberapa ukuran otonomi, sebuah peraturan yang menetapkan inisiatif dan menjadi berbeda dengan yang lain.

3. DEMOKRATISASI DAN LOKALISME BARU

Dengan bermunculannya paham demokrasi yang baru dan isu-isu menonjol yang diperbaharui secara pantas menghubungkan antara ekonomi dan pemerintah, dua sejarah yang cenderung dipisahkan. Kecenderungan pertama, ada sekitar 150 tahun yang lampau, bahwa pemerintah nasional memperluas hubungan kekuasaan otoriter dengan pemerintah lokal. Kecenderungan kedua, bahwa pendapatan pemerintah dibagi dari GNP yang tumbuh secara cepat dari GNP di antara negara - negara kapital dan komunis. Proses ini mulai disendirikan dalam tahun 1970-an dan 1980-an.

Kenyataan dari suatu pilihan perluasan ekonomi politik global dari unit-unit ekonomi internasional memasuki daerah mengurangi keleluasaan nasional. Pemerintah lokal sejauh inilah yang menentukan adanya politik demokrasi lokal dan globalisas ekonomi.

Hubungan antara pemerintah lokal dan demokrasi didasarkan pada proposisi bahwa partisipasi politik yang selama ini diartikan sebagai kesepakatan dengan kekeluargaan, sebuah ajaran dari *federalist papers*. Aspek lain dari pendapat ini adalah imbalan dari partisipasi lokal lebih kuat dari pada partisipasi nasional dalam pemberian konsekuensi yang lebih terlihat dan cepat pada tingkatan lokal. Ada dua proposisi yang mendukung pendapat tersebut; unit politik yang besar akan lebih lama dalam membentuk koalisi demokrasi politik, dan unit politik yang besar lebih besar akan semakin besar pula keanekaragaman permintaan kelompok-kelompok dan individu untuk kompromi, oleh karena itu, seperti halnya penentuan

tindakan yang diambil kurang serta banyaknya aspirasi kelompok yang gagal.

Dua perkembangan lokal politik lainnya adalah kecenderungan terhadap demokratisasi yang difasilitasi oleh globalisasi. Pertama adalah menentukan hubungan dengan asing, tuntutan yang panjang untuk menjadikan monopoli pemerintah nasional. Khususnya perwujudan dari hubungan-hubungan lokal-global yang mempermudah perwakilan asing dari propinsi atau negara di negara-negara lainnya. Kedua adalah munculnya hubungan kota ke kota dalam pergerakan kota.

4. PERKEMBANGAN LOKAL DAN LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRATIK

Kemunculan sistem negara modern di eropa menjadi bagian yang wajib untuk persekutuan antara raja-raja dan kelompok politik lokal yang diawasi oleh masyarakat pusat kota. Mereka biasanya berkepentingan pada perdagangan dan apa yang mendukungnya; sebuah jaminan keuangan, hubungan eksternal yang baik dan keamanan. Perkembangan demokrasi berasal dari pencerahan di Eropa pada akhir abad 18.

Sedikitnya lembaga-lembaga demokrasi ini akan didiskusikan. Dalam demokrasi yang baru dan sedikitnya negara-negara yang bercita-cita menjadi demokratis, hal ini menjadi bahan untuk debat. Tentu saja, sistem komunis tergabung dalam politik lokal menjadi sebuah heirarki partai politik. Kekhawatiran Sistem autoritarian politisi lokal sebagai hilangnya kontrol dengan konsekuensi anarkis. Perkembangan demokrasi dari para politisi lokal terbentuk di negara-negara komunis, persatuan negara Amerika latin sebagaimana beberapa rejim autoritarian di Asia.

5. PEMILIHAN PEJABAT LOKAL DAN PEMISAHAN KEKUASAAN

Perkembangan demokrasi di US dengan memasukkan kemunculan sebuah daerah pemilihan dan membagi kekuasaan dengan struktur pemerintahan. Di sebagian kota, ada pemilihan badan legislatif dan memilih eksekutif. Harapannya jelas untuk membentuk pemerintahan, yang menurut versi parlemen US, dimana komisi pemilihan menyeleksi secara umum atau pejabat eksekutif kota.

Perbedaan yang ada, suatu ciri khusus dari daerah Unisoviet dalam bentuk negara komunis membagi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam suatu badan tersendiri, yang keduanya dipilih dan ditetapkan. Eksekutif dipilih tetapi juga ditetapkan oleh pejabat tertinggi. Seringkali jika menyeleksi daerah, eksekutif bertanggungjawab pada pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat tinggi, tidak ada pemilihan konsultatif apapun. Pada demokrasi parlemen pusat yang tertinggi, Inggris sebagai contohnya, fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisah, dan bertanggungjawab pada badan legislatif, suatu parlemen lokal atau kouncil, dengan eksekutif dipilih oleh dewan legislatif dari pada melalui proses pemilihan yang mandiri. Pejabat-pejabat lokal dapat diawasi oleh calon pemilih dan partai politik nasional dari pada dipilih oleh proses politik lokal yang otonom, yang memasukkan partai politik lokal. Sistem demokrasi presidensial umumnya langsung memilih presidensebagaimana memilih pejabat eksekutif lain di propinsi dan tingkat daerah.

Sebuah pemisahan kekuasaan pada umumnya membolehkan lebih banyak channel untuk membawa kepentingan politik bersama. Keduanya, lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya terus menerus memelihara dan membangun dasar politik lokal. Perlunya Pembagian pemimpin eksekutif dan legislatif adalah bahwa agar mereka berbuat banyak. Isu apapun lebih baik ditindaki tanpa memperhatikan apa yang disukai warga negara atau untuk menerima pemogokan yang melekat pada pemisahan kekuasaan yang dinamakan demokrasi.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada demokrasi pada tingkatan nasional dengan persaingan pemilihan dan lembaga perwakilan dalam suatu negara kesatuan dari pada negara desentralis.

Jawaban klasiknya adalah mungkin, jika negara kecil dan homogen. Mungkin tidak, jika negara besar dan beraneka ragam. Dalam kasus lainnya, negara kesatuan akan kurang demokratis.

6. OTONOMI DAERAH

Tes kritik kedua dari demokrasi adalah otonomi daerah. Apakah bisa pemerintah lokal melakukan kemandirian keputusan dari beberapa kewenangan tingkat tinggi. Semua demokrasi yang didirikan daerah membangun konflik antara pusat dan daerah. Satu perbedaan ekstrim disini adalah penetapan hukum bagi hubungan dua warganegara, seperti kasus di US dengan undang-undang (hak) politik negara dan bangsa; yang lain adalah undang-undang nasional warga negara mengesampingkan anugrah hak-hak istimewa lokal .

Pertanyaannya adalah, apakah derajat atas keleluasaan adalah tugas penting untuk pemerintah lokal

untuk mempunyai sebuah agenda yang cukup untuk memasukkan partisipasi umum serta kesepakatan kepentingan organisasi lokal. Jika terdapat sedikit area-area pilihan daerah, kemudian tindakan politiknya adalah akan menjadi pemerintah tingkat tinggi. Pertanyaan ini dapat menjadi bagian dari jawaban empirik oleh pengamatan keberadaan kepentingan organisasi politik yakni; dalam modal nasional atau kantor-kantor umum. Giliran pengaruh dari negara kapitalis Washington dalam US sejak tahun 1930-an menceritakan sejarah sentralisasi pemerintahan tersebut. Perkembangan demokrasi akan memasukkan perluasan otonomi lokal dan giliran untuk bekerjasama dari pada konflik antar tingkatan pemerintah.

Dimensi lain dari otonomi lokal adalah kebenaran dan kemampuan masyarakat dan kelompok untuk mendirikan pemerintahan lokal yang baru dan berbeda. Dua perkembangan dalam negara-negara persemakmuran adalah lebih banyak atau pun kurangnya pemerintahan formal atau diamnya perkumpulan-perkumpulan dan organisasi disekitarnya. Keduanya lebih kecil dari kota-kota atau cakupan kewenangan lebih besar ada pada pemerintah. Keduanya memiliki prosedur untuk menjangkau keputusan-keputusan penanganan sesegera mungkin atas lingkungan-keamanan-penataan-penggunaan ruang dan berwenang atau turut campur mengenai pajak dan pungutan sukarela lainnya.

7. KEMAMPUAN UNTUK MEMBANGUN SUMBER DAYA

Tes ketiga dari pemerintahan dan politik yang bermaterikan demokrasi adalah kewenangan daerah untuk pajak dan pengumpulan pendapatan. Disini, kekuasaan

pajak untuk beberapa level minimal, cara kerjanya menegaskan karakteristik pemerintah. Satu ketegasan wewenang dari pemerintah dan para politisi dalam mengalokasikan sumber daya. Tentu saja, pemerintah, lembaga-lembaga bentukan pemerintah dari tindakan kolektif yang sah, memasukkan lebih banyak; standar moral tingkah laku dan penegasan dari masyarakat dan masyarakat politik yang baik.

Ditambahkan, untuk membatasi sumber daya, pemerintah tidak leluasa atas pajak politik, pasar, adat istiadat, dan peraturan dan kesepakatan pemerintah tingkat tinggi dan internasional. Pertanyaannya tidak saja hubungan antara politik dan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara umum, tetapi juga kebutuhan dari demokrasi bagi pasar untuk berfungsi menumbuhkan sumber daya persebaran sumber daya secara terus etrang. Sebuah pertanyaan yang lebih relevan dengan perkembangan demokrasi politik bukanlah demokrasi pasar melawan demokrasi sosialis, suatu isu diperdebatkan dalam demokrasi baru, tetapi lebih membatasi pemberian kolektif sumber daya alam dalam suatu demokrasi, menyampaikan bahwa kebutuhandemokrasi secara individual memilih antara konsekuensi individu dan kelompok.

Perkembangan demokrasi menjadi pilihan kebutuhan bagi pemerintah. Dengan memperluas pemerintahan lokal dan komunitas serta menghilangkan ketidak leluasaan hubungan dalam mengajak atau menarik mereka, pemerintahan lokal menambah suatu dimensi untuk perkembangan demokrasi. Warga negara demokrasi politik sudah memilihnya. Pilihan-pilihan ini selanjutnya

mempertinggi pertumbuhan sistem politik nasional dan menambah keterbukaan untuk proses imigrasi dan emigrasi dengan penilaian kerangka kerjs dari politik ekonomi internasional.

C. KESIMPULAN

Barangkali tidak pernah sebelumnya, demokrasi tersebar sebagai revolusi kedua demokrasi seluruh dunia tetapi tanpa melawan kekuatan ideologi pada peristiwa yang lalu. Persekutuan politik, mungkin daerah dengan global membentuk hubungan politik yang baru, seperti raja dengan "*burghers*" pada abad sebelumnya. Hasilnya mungkin menajamkan dunia politik untuk menjadi lebih komplek dari institusi global, perkumpulan besar regional, bangsa-negara, dan sejumlah besar daerah. Jika demokrasi mengakar dalam pelarian yang panjang, kemudian perkembangan demokrasi politik akan terjadi pada tingkatan daerah.

Tantangan demokrasi pada abad 20 adalah paham fasisme, komunisme negara sosialis dan paham otoritarian nasional. Pertama, dua darinya tidak dipercaya; kemudian mereka jelas bertahan. Tetapi demokrasi sejauh ini didirikan sebagai penumbuh kedamaian dan kemakmuran dengan pilihan sebagai cirinya. Masyarakat sosial bukan demokrasi. Demokrasi harus didasarkan pada institusi yang bertanggungjawab pada masyarakat pada jalan yang bermacam-macam. Suatu bentuk bukti politik dari demokrasi adalah pemerintahan lokal. Berbahaya untuk membohongi kemerosotan demokrasi, menjadi picik dan semena-mena, yang berasal dari kemunculan sebagian besar kemerdekaan kekuatan

negara. Gelapnya lokalisme waktu lampau dikembangkan oleh penutupan diri dan permusuhan dengan pihak asing.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

DAFTAR PUSTAKA

Siagian, Sondang P., 1985. Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.

Soeprapto, H.R Riyadi, 2000. Administrasi Pembangunan. Malang: UM Press.

Suwarsono, Alvin Y. SO, 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.